

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga keuangan yang terbentuk setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) beserta wewenang dan hambatan yang dihadapi lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan dengan mencari berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Metode analisa data yang digunakan merupakan teknik analisa data secara kualitatif yang mengelompokkan data dari studi kepustakaan yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang baru terbentuk setelah adanya UUOJK ini merupakan lembaga independen dengan wewenang yang lebih luas dari lembaga sebelumnya yang mencakup berbagai aspek. Namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga ini menghadapi hambatan yang kemudian harus menemukan upaya untuk mengatasi hambatan ini agar mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: kedudukan, Lembaga, wewenang, UU OJK

ABSTRACT

This study aims to determine the position of financial institutions that were formed after the enactment of Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK Law) along with the authorities and obstacles faced by the institution. The research method used is a normative research method using primary and secondary legal sources. The data collection procedure was carried out by means of library research by searching for various literatures related to the research material. The data analysis method used is a qualitative data analysis technique that groups data from literature studies that are arranged systematically. The results of the study indicate that the new financial institution that was formed after the OJK Law was enacted is an independent institution with broader authority than the previous institution covering various aspects. However, in carrying out its duties and authorities, this institution faces obstacles which must then find efforts to overcome these obstacles in order to realize the creation of effective and efficient capital market activities.

Keywords: position, institution, authority, OJK Law